



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT

BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Rapat ke : -
Jenis Rapat : Rapat Koordinasi
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Kamis, 23 Januari 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Diplomasi, Gedung Nusantara 3 Lantai 6
Acara : 1. Pembahasan Presidensi APA 2026-2027 dan Persiapan Penyelenggaraan Sidang Ke-3 IPPP;
2. Lain-Lain.
Ketua Rapat : Diah Aty Rachmawaty, S.IP., M.Si - Kepala Bagian Set. KSR
Sekretaris Rapat : Iis Muldiyanti, S.Sos., M.M. - Kasub Rapat Set. KSR
Hadir : Kementerian Luar Negeri RI
1. Virdiana Ririen Hapsari - Diplomat Ahli Madya
2. Ruth Yohanna Lumbanraja - Diplomat Ahli Muda

Tenaga Ahli BKSAP

1. Tide Aji Pratama, S.IP., M.Si
2. Mochamad Ilyas, MA
3. Made Fitri Maya Padmi, M.Sc
4. Keanu Arief Triputra Ramadhana Trisulo, BA (Hons), LLM
5. Heriyono Adi Anggoro, M.Hum
6. Dr. Farahdina Al Anshori, S.Pd.I., M.Si
7. Nida Nidyarti Rubini, M.Si.

Bagian Sekretariat Kerja Sama Regional

1. Siti Nur Aidah, S.A.P., M.A.P
2. Andam Perwitasari, S.IP., M.IP
3. Refaini Hasna Ghassani, S.H – Penelaah Teknis Kebijakan
4. Ahmadi - Pengolah Data
5. Sigit Fitriyanto - Pengadministrasi Umum
6. Rindias Mega Rahmawati, M.Ad - Pengelola Persidangan

I. Pendahuluan

Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Set. KSR, selaku Ketua Rapat, pada pukul 10.00 WIB.

II. Kesimpulan/Keputusan

1. Mengawali Rapat, Kepala Bagian Set. KSR selaku Ketua Rapat menyampaikan poin-poin sebagai berikut:
 - a) Dalam waktu dekat Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI serta Ketua DPR RI akan menghadiri Sidang Pleno ke-15 *Asian Parliamentary Assembly* (APA) di Baku, Azerbaijan. BKSAP DPR RI mengharapkan dukungan bahan masukan dari KEMLU RI sesuai surat yang telah disampaikan;
 - b) DPR RI telah menerima Surat dari Sekjen APA perihal usulan Indonesia menjadi Kandidat Presiden APA Periode 2025-2026 dan mendapat tawaran secara lisan untuk menjadi tuan rumah Sidang Komite Politik (*Standing Committee*) APA tahun 2025. Saat ini sudah ada 3 (tiga) kandidat Presiden APA Periode 2025-2026, yaitu Rusia, Iran dan Bahrain;
 - c) Sidang Komite Anggaran dan Perencanaan APA telah menetapkan kewajiban iuran kontribusi bagi Parlemen Anggotanya, namun memberikan kelonggaran jika ada yang berkeberatan dan dapat mengajukan surat resmi dengan penjelasan;
 - d) Sesuai hasil sidang ke-2 *Indonesia Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP) tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam dokumen *Chair's Summary*, terdapat aspirasi untuk mentransformasi IPPP menjadi forum yang terlembagakan (*assembly*) dengan rekomendasi pelaksanaan Sidang IPPP setiap 2 (dua) tahun sekali;
 - e) DPR RI meminta penjelasan KEMLU RI perihal relevansi hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik, terutama dalam kaitannya dengan kelanjutan IPPP serta *Pacific Island Forum* (PIF) di mana Indonesia menjadi *Dialogue Partner*.
2. Terkait *Asian Parliamentary Assembly* (APA), Ruth Yohanna Lumbanraja, Diplomat Ahli Muda KEMLU RI menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika KEMLU saat ini menyiapkan materi masukan dan akan segera menyampaikan kepada DPR RI di akhir Januari. Sementara untuk pendampingan delegasi DPR RI tidak dapat dilakukan karena kebijakan pengetatan anggaran di KEMLU RI;
 - b) Berkenaan dengan kebijakan iuran kontribusi, Dit. Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika berkoordinasi dengan Dit. Kerja Sama Multilateral, yang dalam waktu dekat akan bersurat ke DPR RI untuk membahas urgensi, analisa biaya dan manfaat, serta rencana pemanfaatan strategis dan konkret perihal keanggotaan Indonesia di APA untuk dapat memutuskan perlu tidaknya Indonesia membayar kontribusi.
 - c) Pembayaran Kontribusi Indonesia dalam keanggotaan di Organisasi Internasional mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional. Umumnya dibutuhkan akuntabilitas keanggotaan pada OI seperti tersedianya *charter*/AD-ART, dasar penetapan besaran kontribusi, pemanfaatannya, Laporan Keuangan Tahunan, basis hukum keanggotaan (Permenlu, Perpres), manfaat kualitatif (dampak terhadap *stakeholders*) dan kuantitatif nya;

- d) KEMLU memberikan masukan jika Indonesia menjadi Presiden APA Periode 2025-2026 maka Indonesia harus mampu menyelesaikan pembahasan rancangan resolusi yang selama ini tidak terselesaikan;
 - e) Berkenaan dengan peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA), per November 2024, KEMLU telah mendapat arahan dari Presiden RI untuk tidak menyelenggarakan kegiatan seremonial KAA secara besar. Sebagai alternatif, akan dilaksanakan kegiatan yang lebih *soft* yang melibatkan pejabat negara di level Menteri, Direktur Jenderal, dan Duta Besar;
 - f) Di level eksekutif sebagai padanan dari APA, Indonesia menjadi anggota aktif *Asia Cooperation Dialogue* (tidak berbayar) di mana Indonesia baru menyelesaikan kepemimpinannya di periode 2023-2024. Namun sebagai pemrakarsa, Indonesia hanya fokus pada kerja sama energi.
3. Berkenaan dengan sidang *Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)*, Viridiana Ririen Hapsari, Diplomat Ahli Madya KEMLU RI menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
- a. Penting untuk membina hubungan dengan negara-negara Pasifik, utamanya kerja sama di bidang pembangunan sehingga perlu dilanjutkan di berbagai level;
 - b. *Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)* dipandang strategis sebagai penguatan dukungan *stakeholders* dalam tingkatan *people to people*;
 - c. Direktur Jenderal *Melanesian Spearhead Group (MSG)* mengusulkan dibentuknya forum parlemen MSG;
 - d. Perwakilan Indonesia di Canberra menginfokan, terdapat fleksibilitas dukungan negara-negara Pasifik terhadap Indonesia sehingga IPPP dirasa cukup signifikan;
 - e. Terkait posisi Vanuatu terhadap Indonesia, terdapat kecenderungan pada masyarakat Vanuatu untuk memilih Perdana Menteri yang sudah dikenal. Oleh karena rentannya posisi sikap Vanuatu terhadap Indonesia maka hubungan dengan Vanuatu perlu dijaga dan dibina secara baik;
 - f. Berkenaan dengan rencana transformasi IPPP menjadi *assembly*, perlu dipertimbangkan kesiapan sumber daya manusia dan finansialnya. Perlu pula diverifikasi realisasi dari rekomendasi/komitmen sidang, salah satunya pelaksanaan *capacity building*;
 - g. Posisi pemerintah saat ini sangat kuat dalam hal dukungan terhadap negara-negara Pasifik dan Presiden akan melakukan kunjungan ke Vanuatu pada semester awal 2025. Kerja sama pembangunan menjadi prioritas salah satunya melalui *engagement* antara kamar dagang dan industri dengan negara-negara Pasifik;
 - h. KEMLU mendukung Indonesia untuk melanjutkan sidang IPPP namun mengingatkan pula untuk merealisasikan hasil-hasil sidang IPPP sebelumnya sebagai wujud komitmen dan keseriusan DPR menjalin kerja sama dengan Parlemen negara-negara Pasifik. KEMLU merekomendasikan DPR mengonfirmasi kebutuhan *capacity building* negara-negara Pasifik;
 - i. Di level Eksekutif, Indonesia merupakan *Dialogue Partner* bagi *Pacific Island Forum (PIF)* yang menyelenggarakan sidang secara bienial. PIF melakukan klasterisasi mitra ke dalam 2 (dua) kelompok berdasarkan kontribusinya terhadap 7 (tujuh) poin strategis PIF yang secara spesifik fokus pada penanggulangan bencana. Indonesia masuk ke dalam *tier 2*, yang kontribusinya fokus pada *capacity building*.

4. Peserta Rapat menyepakati untuk diadakannya rapat koordinasi lanjutan jika diperlukan, terkait pokok-pokok pembahasan rapat.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB oleh Ketua Rapat.

a.n. Ketua Rapat,
Sekretaris,



Diah Aty Rachmawaty, S.IP., M.Si